

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis hubungan antara belanja modal, pendapatan asli daerah, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada kabupaten dan kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1), 68–79.
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 364–369.
- Cooper, D.R., & Schindler, P. S. (2014). *Business research methods*. New York, McGraw-Hill.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–23.
- Dwirandra, A. A. N. . (2008). Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi bali tahun 2002-2006. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 1–21.
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing regional finance independence in indonesian local governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1), 1–5.
- Freeman, R.E. dan J. McVea. (2001). A stakeholder approach to strategic management.
- Garson, G.D. (2016). Partial least squares: regression and structural equation models. In *Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers*.
- Ghozali, I. (2014). *Structural equation modelling, metode alternatif dengan partial least square (PLS)*, Edisi 4, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Hengky, L. (2015). *Partial least squares: konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*, Edisi 2, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. (2014). *Corporate social responsibility*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling*. California, Sage.

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2012). *Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–26.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling. (1976). "Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic*, 3:305-360.
- Juri, H. M. (2012). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota samarinda. *Jurnal Eksis*, 8(1), 2020–2031.
- Kadafi, M., & Putra, W. W. (2013). Kemandirian keuangan daerah (studi kasus pemerintah kota samarinda tahun 2001-2010). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-2*, 1–14.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di sumatera barat (tahun 2006-2011). *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 2–22.
- Nafi'iyah, N. (2016). Perbandingan modus, median, standar deviasi, iterative, mean dan otsu dalam thresholding. *Spirit*, 8(2), 31-36.
- Naganathan, M & Sivagnam, J.K. (2000). "Federal transfer and the tax effort of the states in india". *Indian Economic Journal*. Vol. 47 No. 04. University of Madras. 252-281.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 623–635.
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten atau kota di provinsi jawa tengah (studi empiris pada kabupaten/kota provinsi jawa tengah). *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh pajak, retribusi, dbh, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174–186.
- Nurhasanah, & Maria. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 60–73.

Pallant, J. (2005). *SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for windows (version 12)*.

Pelealu, A. M. (2013). Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota Manado tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA*, 1(4), 1189–1197.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 *tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007*. (2008). Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*. (2006). Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2011 *tentang klasifikasi anggaran*. (2011). Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *tentang dana perimbangan*. (2005). Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang standar akuntansi pemerintahan*. (2010). Jakarta.

Prakosa, K. B. (2004). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 8(2), 101–118.

Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.

Saleh, R. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad) dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134.

Sekaran, U. (2003). *Research methods for business: a skill building approach*, New York-USA: John Wiley and Sons, Inc.

Sekaran, U. (2006). *Research methods for business*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.

Sumarmi, S. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Assets*, 5(1), 5–11.

- Suratno, & Mulyadi, J. (2020). Taxes , revenues and capital expenditure as determinants of financial sufficiency of regional government. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(2), 283–290.
- Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi pada kota/kabupaten di provinsi jawa barat tahun 2010-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3308–3314.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 12(1), 88–99.
- Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2017). Pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi DIY. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 24(1), 25–34.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. (2004). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. (2000). Jakarta.
- Wong, D.J. (2004). 'The fiscal impact of economic growth and development on local government capacity'. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Vol. 16, No. 03. 413-42.
- Yulihantini, D. T., Sukarno, H., & Wardayati, S. M. (2018). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi dana desa terhadap kemandirian dan kinerja keuangan desa di kabupaten jember. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 37–50.
- Yuliyanti, L., Nugraha, N., & Fadilah, Y. K. (2019). The influence of local own-source revenue towards regional financial independence. *Atlantis Press*, 65, 4–7.